

BAB I

PENDAHULUAN

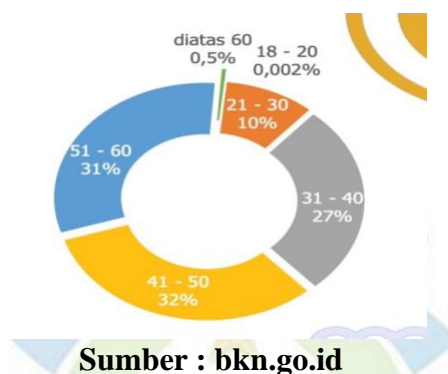
A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia yang sangat cepat telah menjadi instrumen penting dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam sektor pelayanan publik. Dalam era modern ini, teknologi informasi telah membawa kemudahan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Hampir semua orang kini menggunakan Smartphone untuk mempermudah rutinitas sehari-hari masyarakat Indonesia. Teknologi informasi telah merambah ke berbagai pengelolaan data di pemerintahan. Peralihan ke dunia digital telah mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan guna mempercepat proses digitalisasi. Warsita (2018: 135) teknologi informasi sebagai perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunaan sistem serta Metode yang diterapkan untuk mendapatkan, mengirimkan, memproses, menafsirkan, dan menyimpan informasi. mengorganisir, dalam menggunakan data dengan signifikansi

Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, pada Sistem Aplikasi ini adalah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang khusus untuk pelayanan kepegawaian. My-SAPK BKN muncul sebagai tanggapan atas kebutuhan teknologi informasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Indonesia. Tujuan penggunaan teknologi informasi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data

Untuk mendapatkan data PNS yang akurat, My-SAPK BKN diharapkan dapat meningkatkan data dalam berkontribusi pada keberlangsungan clean *E-Government*. Tujuan utama penciptaan My-SAPK BKN, menurut Sudarmin (2016) adalah mencapai pembaruan data kepegawaian yang terkini di setiap lembaga pusat dan daerah, yang terhubung secara nasional melalui aplikasi My-SAPK BKN

Gambar 1.1 Presentase Kelompok Usia ASN



Pada gambar 1.1 diatas menunjukkan presentase kelompok ASN di indonesia sebagian berada di kelompok usia 21-30 tahun presentase 10% pada usia 31-40 tahun presentase 27% selanjutnya 41-50 tahun dengan presentase 32% disusul kelompok usia 51-60 tahun dengan presentase 31% yang merupakan usia mendekati usia pensiun bagi ASN. Jumlah ASN di indonesia 4.282.429 pada instansi pemerintah Daerah sebanyak 3.328.942 (78%) sedangkan yang bekerja pada instansi pemerintah Pusat berjumlah 953.487 (22%). ASN wanita masih mendominasi bila dibandingkan dengan Aparatul Sipil pria, maka jumlah ASN wanita sebanyak 2.358.660 (55%) sedangkan jumlah Aparatul Sipil Negara laki-laki sebanyak 1.923.769 (45%). Sebanyak 71% ASN di indonesia berjenjang pendidikan terakhir Sarjana, sedangkan Diploma 15% dan SD-SMA 14% maka hal ini dipengaruhi oleh banyaknya diperlukan lulusan Sarjana pada proses penerimaan CPNS yang dibuka oleh pemerintah beberapa tahun ini (bkn.go.id). Kemudian alasan peneliti mengambil Dinas Perhubungan karena presentasinya paling sedikit

hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini alasan itu yang mengantarkan peneliti kenapa penelitian di Dinas Perhubungan Kota Bandung

Tabel 1.1 Perbandingan Dinas Kota Bandung 2023

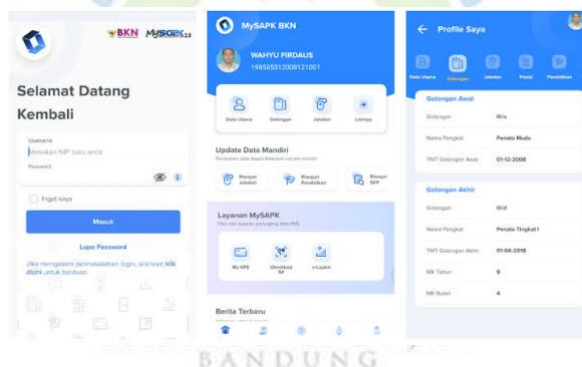
NO	Nama Dinas	Presentase 2023
1.	Dinas Pendidikan	99,03%
2.	Dinas Kesehatan	98,87%
3.	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	88,61%
4.	Dinas Lingkungan Hidup	86,29%
5.	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	85,47%
6.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	81,09
7.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	77,06%
8.	Dinas Tenaga Kerja	70,69%
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	69,25%
10.	Dinas Pemuda dan Olahraga	61,03%
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60,57%
12.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	60,09%
13.	Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang	60,04%
14.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	57,46%
15.	Dinas Koprasi	52,04%
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51,45%
17.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	50,43%
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika	50,23%
19.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50,11%
20.	Dinas Sosial	48,01%
21.	Dinas Perhubungan	42,12%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung 2023

Tabel diatas bisa dilihat bahwa tabel tersebut dimana terdapat masih belum efektif dalam penggunaan Aplikasi My-SAPK BKN pada Dinas yang ada di Kota

Bandung berjumlah 21 Dinas salah satunya yang masih belum efektif dibawah 50% yaitu perbandingan pada Dinas Perhubungan 42,12% yang berjumlah 257, pada 19 Dinas yang lain sudah cukup baik diatas 50% dalam menggunakan aplikasi My-SAPK BKN, sehingga perlu dilakukan memaksimalkan dalam penggunaannya secara efektif dan efisien pada penggunaan para PNS dalam menggunakan aplikasi My-SAPK BKN. Maka alasan peneliti mengambil lokus di Dinas Perhubungan sangat minim dalam menggunakan aplikasi My-SAPK BKN ini dalam penggunaannya paling rendah dibandingkan Dinas lainnya yaitu 42,12% sehingga efektivitas dalam penggunaannya masih perlu pengawasan dan arahan pada PNS di Dinas perhubungan

Gambar 1.2 Tampilan Aplikasi My-SAPK BKN



Sumber : Aplikasi App Store

Pada gambar 1.2 diatas menunjukan aplikasi My-SAPK BKN merupakan berbasis teknologi seluler terintegrasi dengan database Nasional PNS dan menyediakan informasi profil PNS mencerminkan upaya diseluruh Indonesia untuk memanfaatkan teknologi terbaru dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat. Dalam konteks administrasi kepegawaian ASN, aplikasi Ini digunakan untuk berbagai tugas, seperti menetapkan NIP, mencetak surat keputusan pengangkatan CPNS, menilai kenaikan pangkat, dan

mencetak surat keputusan yang berkaitan dengan kenaikan pangkat serta pemutakhiran data mutasi pegawai secara daring. Maka dengan hadirnya aplikasi ini sangat mendorong dan mempermudah pegawai ASN dalam hal penyimpanan dan perubahan data dan informasi yang lebih cepat ketenagakerjaan Aparatur Sipil Negara di Indonesia (bkn.go.id).

Kemudian sebelum adanya aplikasi My-SAPK BKN banyak PNS mengalami ketidaktertiban administrasi dalam data kepegawaian mereka. Hal ini disebabkan administrasi pribadi dan pelayanan kurang efektif, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan administrasi kepegawaian. Dampaknya, data pegawai menumpuk dan belum diperbarui, mengakibatkan pegawai yang seharusnya pensiun tetap menerima gaji, merugikan negara. Namun adanya aplikasi ini membantu menangani permasalahan ini dengan meningkatkan efektivitas kinerja pegawai dengan informasi dan memastikan kepatuhan administrasi kepegawaian.

Namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat seberapa efektif My-SAPK BKN digunakan pada Dinas Perhubungan di Kota Bandung yang berjumlah 257 PNS dengan presentase 42,21% dibandingkan Dinas Pendidikan di Kota Bandung yang berjumlah 7,126 PNS dengan presentase 99,03% yang sudah cukup efektif dalam menggunakan aplikasi My-SAPK BKN maka peneliti tertarik dalam mengambil di Dinas Perhubungan Kota Bandung yang masih belum efektif dalam penggunaannya beberapa permasalahan tersebut meliputi rendahnya kesadaran pegawai dalam mengikuti perkembangan teknologi dalam penggunaan teknologi informasi salah satunya pada rentangnya usia pada tahun 40-57 pegawai PNS, gangguan server yang sering bermasalah

Hal ini menyebabkan ketidakdisiplinan pegawai, proses tertunda, dan ketidaksesuaian data kepegawaian, seperti data penting PNS salah satunya penetapan NIP, kenaikan Jabatan, pengangkatan CPNS dan proses pensiun, sehingga berdampak kendala pada kelancaran pengelolaan urusan kepegawaian pada pelayanannya yang seharusnya mempercepat pelayanan pegawai tetapi pada dasarnya kurangnya kesadaran pegawai sehingga menghambat proses akses data kepegawaian pada Dinas Perhubungan di Kota Bandung. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung mengenai rekapan data PNS yang rentang usia sehingga menghambat proses akses yang menggunakan aplikasi ini setelah diolah peneliti menemukan permasalahan yang banyak terjadi akibat rentangnya usia pegawai dari usia 40-57 tahun 2021-2023 sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung Berdasarkan Rentang Usia Tahun 2021-2023

NO	Rentang Usia	Jumlah Pegawai					
		2021		2022		2023	
1.	40 – 45 tahun	138	14,18%	132	14,06%	127	14,23%
2.	46 – 51 tahun	91	14,12%	80	13,85%	82	13,49%
3.	52 – 57 tahun	78	13,03%	62	12,77%	48	14,04%

Sumber: Data Dinas Perhubungan Kota Bandung 2021-2023

Data diatas bahwa pegawai dengan rentang usia 40-57 tahun pada tahun 2021 berjumlah 307 dengan presentase 41,52% dengan jumlah keseluruhan, kemudian pada tahun 2022 berjumlah 274 dengan presentase 40,68% dan pada tahun 2023 berjumlah 257 dengan presentase 42,12% dari data tersebut ditemukan fakta bahwa data pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung masih didominasi oleh pegawai yang memiliki rentang usia dalam menggunakan aplikasi My-SAPK BKN ini. Sehingga bisa dapat dilihat belum maksimal penggunaan Aplikasi ini dalam pemanfaatan pada kinerja pegawai Dinas Perhubungan di Kota Bandung,

seharusnya mempermudah kinerja pegawai adanya aplikasi ini membantu proses data pegawai dan aktivitas pegawai dalam pengelolaan data tetapi masih banyak beberapa pegawai yang kurang pemahaman dalam menggunakan aplikasi sehingga memperlambat proses input data pegawai.

Dengan demikian latar belakang ini maka peneliti tertarik dengan fenomena dilapangan yang relevan sesuai dengan data yang ada untuk diteliti tentang Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi My-SAPK BKN Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Dinas Perhubungan di Kota Bandung tentang dampak teknologi dalam penggunaan aplikasi My-SAPK BKN sehingga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pegawai dan pelayanan publik Dinas Perhubungan di Kota Bandung

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka perlu adanya identifikasi masalah untuk mempermudah penjelasan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa identifikasi masalahnya yaitu sebagai berikut :

- A. Masih kurangnya pemahaman para Aparatur Sipil Negara ASN dalam menjalankan aplikasi My-SAPK BKN karena rentang usia 40-57 tahun sehingga menghambat proses kinerja pegawai.
- B. Server dari aplikasi My-SAPK BKN yang masih belum siap untuk menampung pengguna yang besar di waktu bersamaan karena aplikasi yang berbasis online

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas maka penelitian membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemahaman Program Pemanfaatan Aplikasi My-SAPK BKN Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pada Dinas Perhubungan di Kota Bandung?
2. Bagaimana Tepat Sasaran Pemanfaatan Aplikasi My-SAPK BKN Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pada Dinas Perhubungan di Kota Bandung?
3. Bagaimana Tepat Waktu Pemanfaatan Aplikasi My-SAPK BKN Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pada Dinas Perhubungan di Kota Bandung?
4. Bagaimana Tercapainya Tujuan Aplikasi My-SAPK BKN Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pada Dinas Perhubungan di Kota Bandung?
5. Bagaimana Perubahan Nyata Aplikasi My-SAPK BKN Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pada Dinas Perhubungan di Kota Bandung?

D. Tujuan Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis diantaranya :

1. Pemahaman Program Pemanfaatan Aplikasi My-SAPK BKN Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pada Dinas Perhubungan di Kota Bandung
2. Tepat Sasaran Pemanfaatan Aplikasi My-SAPK BKN Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pada Dinas Perhubungan di Kota Bandung
3. Tepat Waktu Pemanfaatan Aplikasi My-SAPK BKN Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pada Dinas Perhubungan di Kota Bandung

4. Tercapainya Tujuan Pemanfaatan Aplikasi My-SAPK BKN Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pada Dinas Perhubungan di Kota Bandung
5. Perubahan Nyata Pemanfaatan Aplikasi My-SAPK BKN Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pada Dinas Perhubungan di Kota Bandung

E. Manfaat Hasil Peneliti

A. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan, memberikan sumber informasi dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Administrasi pada pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti serta mahasiswa/mahasiswi yang ingin melakukan penelitian tersebut agar memperluas wawasan dan memberikan ilmu terkait Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi My-SAPK BKN Dalam Meningkatkan Pegawai Pada Dinas Perhubungan di Kota Bandung.

B. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi Dinas Perhubunga Kota Bandung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan dalam penggunaan aplikasi My-SAPK BKN dapat membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kinerja pegawai yang dapat berkontribusi pada pelayanan publik yang lebih baik dan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif.

2. Manfaat bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkhusus Jurusan Administrasi Publik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan saran atau masukan dalam memperbaiki dan mempertahankan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan bisa menjadi bahan informasi sebagai referensi bagi para peneliti

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, tentang Efektivitas Pemanfaatan aplikasi My-SAPK BKN tentang pengelolaan administrasi publik dan pelayanan kinerja pegawai di Dinas Perhubungan Kota Bandung. Selain itu bentuk pengimplementasian atas setiap mata kuliah yang telah diperoleh sehingga mampu dalam dunia lapangan

F. Kerangka Berpikir

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara adalah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang khusus untuk pelayanan kepegawaian sebagai tanggapan atas kebutuhan teknologi informasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tujuan penggunaan teknologi informasi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data.

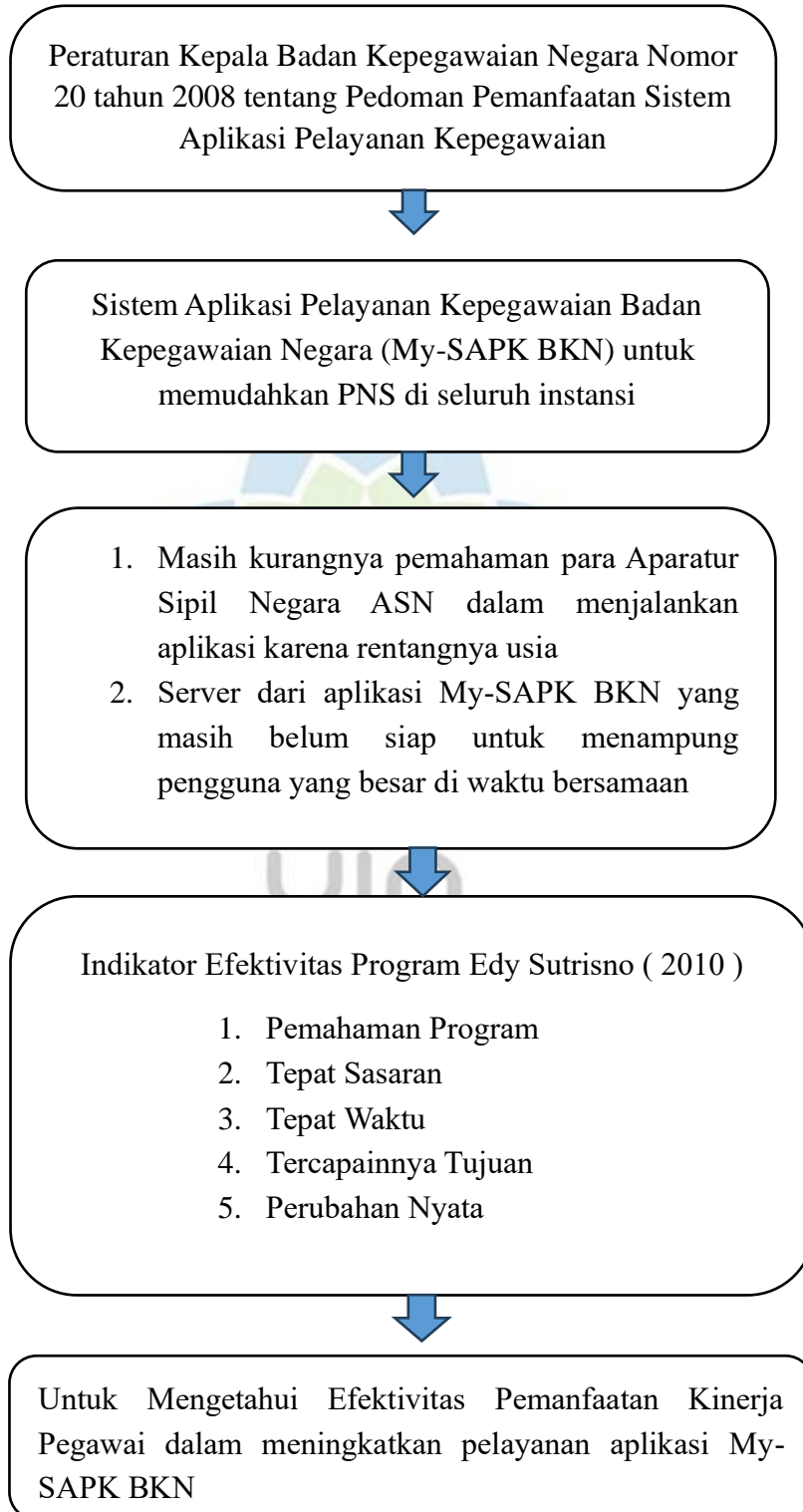
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (My-SAPK BKN) merupakan suatu Aplikasi yang diciptakan untuk mempermudah PNS dalam mendapatkan pelayanan kepegawaian dengan aplikasi berbasis teknologi seperti pengelolaan data PNS salah satunya penetapan NIP, kenaikan Jabatan, pengangkatan CPNS dan proses pensiun. Kerangka pemikiran ini ditinjau sebagai landasan secara sistematis yang digunakan untuk pedoman dalam pembahasan permasalahan yang dibahas didalam penelitian. Adapun permasalahan yang terjadi Masih kurangnya pemahaman para Aparatur Sipil Negara ASN dalam menjalankan aplikasi My-SAPK BKN karena rentang usia 40-57 tahun sehingga menghambat proses kinerja pegawai. Serta server dari aplikasi My-SAPK BKN yang masih belum siap menampung pengguna yang besar di waktu bersamaan secara optimal.

Dilakukan sebuah penelitian lebih lanjut tentang efektivitas aplikasi setelah aplikasi ini muncul, sebagai wadah untuk mempermudah pegawai para PNS melakukan penginputan data. Penelitian ini yaitu teori efektivitas program dikemukakan oleh Edy Sutrisno (2010). Menurutnya untuk dapat mengukur sebuah efektivitas dari program yang dijalankan, memerlukan 5 indikator untuk menguji apakah program yang dijalankan sudah efektif atau belum, kelima indikator tersebut yaitu:

1. Pemahaman Program : Sejauhmana dapat memahami program
2. Tepat Sasaran : sejauhmana berhasil merealisasikan sasaran yang dicapai
3. Tepat Waktu : sejauhmana waktu yang tepat dengan program berjalan efektif
4. Tercapainya Tujuan : apakah tujuan sudah tercapai atau belum
5. Perubahan Nyata : bagaimana bentuk perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya program tersebut

Pada model teori tersebut dipilih karena memiliki keunggulan dibandingkan dengan teori lain seperti teori dari subagyo dalam budiani (2007) dengan proses ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan serta teori dari Richard M. Steers (1985) dengan 3 teori yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan pemantauan yang cangkupannya terlalu luas. Keunggulan yang dimaksud dari teori yang dipilih adalah indikator-indikator dalam teori Edy Sutrisno (2010) lebih jelas dan terperinci serta tidak terlalu luas sehingga lebih spesifik dan mendetail, oleh karena itu teori dari Edy Sutrisno (2010) dengan dimensi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata lebih tepat untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini karena sub indikator dari kelima indikator memiliki kesesuaian dengan apa yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti membuat kerangka berpikir sehingga bisa menggambarkan lebih jelas sebagai berikut :

Gambar 1. 3 Kerangka Berpikir



Sumber : Hasil Peneliti (Diolah Peneliti, 2023)